

MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI TEPAT GAS LPG 3 KG DI PT. SASMITO MULIA ABADI KOTA SURABAYA

Vera Meirani Kusuma Wardani¹, Adi Susiantoro²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(wardanivera58@gmail.com, adisusiantoro@untag-sby.ac.id)

ABSTRAK

Program subsidi LPG 3 kg merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan dalam mekanisme penyalurannya yang belum tepat sasaran. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyaluran subsidi LPG 3 kg secara tepat sasaran. Kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan agen dan pangkalan LPG, sosialisasi kepada masyarakat, serta diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Data dikumpulkan secara kualitatif dan dianalisis untuk melihat efektivitas mekanisme distribusi dan hambatan yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa masih terdapat kebocoran distribusi akibat kurangnya verifikasi data penerima, lemahnya pengawasan di tingkat bawah serta ketidaksesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, sebagian masyarakat belum memahami kriteria penerima subsidi sehingga terjadi penyalahgunaan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dan pelaku distribusi memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sistem penyaluran subsidi yang ideal, serta terciptanya komitmen bersama untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan. Kesimpulannya, penguatan koordinasi antar pihak dan edukasi berkelanjutan sangat diperlukan agar penyaluran subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Implementasi mekanisme yang terstruktur dan berbasis data menjadi kunci keberhasilan program ini.

Kata kunci : Subsidi, program, LPG 3 kg, tepat sasaran

ABSTRACT

The 3 kg LPG subsidy program is a government policy to help low-income or poor people meet their household energy needs. However, its implementation still faces various problems in its distribution mechanism which is not yet on target. The purpose of this community service is to increase the understanding and participation of the community and stakeholders in implementing the distribution of 3 kg LPG subsidies on target. Activities are carried out through field observations, interviews with LPG agents and bases, outreach to the community, and focus group discussions (FGD) with local governments and related stakeholders. Data is collected qualitatively and analyzed to see the effectiveness of the distribution mechanism and the obstacles faced. The results show that there are still distribution leaks due to lack of verification of recipient data, weak supervision at the lower level and the mismatch of the Highest Retail Price (HET). In addition, some people do not understand the criteria for subsidy recipients so that misuse occurs. Through this activity, the community and distribution actors gain a better understanding of the ideal subsidy distribution system, as well as the creation of a joint commitment to increase transparency and supervision. In conclusion, strengthening coordination between parties and ongoing education are very much needed so that the distribution of 3 kg LPG subsidies is truly on target and sustainable. Implementation of structured and data-based mechanisms is the key to the success of this program.

Keywords: Subsidy, program, 3 kg LPG, right on target

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan adalah salah satunya dengan mengadakan Program Subsidi. Subsidi merupakan bantuan dari pemerintah dalam mendukung hidup masyarakat guna untuk meningkatkan perekonomian. Subsidi ini diberikan pemerintah untuk mendukung sektor-sektor tertentu agar perekonomian bisa terus berputar dan berkembang, salah satunya yaitu pada sektor energi. Kebijakan subsidi LPG 3 Kg mulai dilaksanakan pada tahun 2007. Berdasarkan PP No. 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, penerima paket perdana adalah rumah tangga dan usaha mikro, dengan kriteria sebagai berikut: 1) rumah tangga adalah konsumen yang memiliki legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 kg; 2) usaha mikro adalah konsumen dengan usaha duktif milik perseorangan yang memiliki legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro, dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 kg; dan 3) rumah tangga dan usaha mikro yang belum pernah mendapatkan bantuan serupa. Namun dalam peraturan tersebut distribusi LPG bersubsidi masih bersifat terbuka. Meskipun tercantum tulisan '*Hanya untuk Masyarakat Miskin*' pada tabung, tetapi tidak efektif dalam membatasi masyarakat umum membeli LPG bersubsidi. Karena adanya peraturan ini dapat mengenalkan penggunaan LPG, dimana target sasaran program konversi tidak hanya orang miskin meski dalam Undang-undang Energi (2007) menyebutkan subsidi disediakan untuk masyarakat tidak mampu. Mekanisme baru ini bertujuan untuk menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak melalui sistem digitalisasi data dan identifikasi pengguna. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Beberapa hal harus tetap menjadi perhatian pemerintah karena masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program subsidi 3 kg ini, antara lain yaitu: Dalam PP No. 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg telah ditetapkan bahwa penerima subsidi adalah Rumah Tangga miskin dan usaha mikro. Namun, berdasarkan hasil dilapangan dalam pelaksanaannya tabung gas LPG masih dijual secara bebas di pasaran sehingga masyarakat menengah ke atas juga dapat menggunakan subsidi gas LPG 3 kg secara bebas. Mayoritas penerima subsidi berasal dari kelompok menengah ke atas, sedangkan 30 persen masyarakat termiskin hanya menerima 25 persen dari total subsidi yang diberikan pemerintah (Buletin SNKI, 2019). Subsidi ini dinilai lebih banyak memberikan keuntungan bagi kelompok atau masyarakat menengah ke atas, sehingga dari adanya permasalahan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan barang karena ketidaktepatan sasaran dalam proses pendistribusian tabung LPG 3 kg. Hal ini bisa berpengaruh juga pada Harga Eceran Teringgi (HET) yang nantinya tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan sesuai peraturan. Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, maka dalam pengimplementasian pendistribusian subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran, PT. Pertamina memberlakukan pembatasan pembelian LPG melalui website atau aplikasi Merchant Apps MyPertamina (MAP). Aplikasi ini dirancang untuk mendigitalisasi sistem distribusi LPG 3 kg melalui pencatatan dan verifikasi data konsumen. Fitur utamanya meliputi pencatatan transaksi berbasis real-time, pengawasan stok di setiap agen, dan verifikasi pembeli menggunakan KTP. Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah dan Pertamina dapat memantau distribusi subsidi secara lebih transparan dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak (Ramadhan et al., 2020).

Penggunaan aplikasi MyPertamina diwajibkan bagi pengguna LPG bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden No. 104/2007 dan No. 38/2019. Dalam peraturan ini, LPG 3 kg hanya

diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani dengan pendapatan rendah (Liputan6.com, 2024). Sistem verifikasi berbasis KTP dan data keluarga membantu memastikan bahwa distribusi subsidi dilakukan secara tepat sasaran yang mana dapat mencerminkan upaya serius pemerintah dalam meningkatkan efisiensi distribusi subsidi energi. Implementasi mekanisme subsidi tepat ini diharapkan dapat menekan pemborosan anggaran serta menciptakan sistem distribusi LPG yang lebih adil dan transparan. Namun, tantangan dalam sosialisasi, pendataan ulang, dan kesiapan infrastruktur digital menjadi perhatian utama dalam tahap awal pelaksanaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme penyaluran ini menjadi penting guna menilai efektivitas serta kesiapan seluruh elemen yang terlibat dalam mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan langsung masyarakat sasaran serta agen dan pangkalan LPG di wilayah pelaksanaan. Kegiatan diawali dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan warga, pelaku distribusi, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pemahaman dan praktik penggunaan LPG bersubsidi. Setelah tahap identifikasi, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan *subsidi tepat sasaran* LPG 3 kg. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kelompok, pembagian leaflet informasi, serta simulasi penggunaan sistem digital berbasis NIK dalam pembelian LPG. Materi sosialisasi disusun secara komunikatif dan kontekstual agar mudah dipahami masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat berpendidikan rendah. Untuk memperkuat hasil kegiatan, dilakukan juga pelatihan kepada agen dan pangkalan LPG mengenai prosedur teknis pendataan konsumen dan pemanfaatan aplikasi distribusi LPG bersubsidi. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat meningkat dan apakah terjadi perubahan perilaku dalam pembelian LPG 3 kg bersubsidi. Hasil evaluasi menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi penyaluran subsidi energi di masa mendatang.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan *subsidi tepat sasaran* LPG 3 kg masih rendah pada tahap awal. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Puslitbang ESDM (2023) yang menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi subsidi tepat LPG adalah rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan secara langsung yang dilakukan dalam pengabdian ini menjadi sangat relevan dan efektif untuk menjembatani kesenjangan informasi. Peningkatan jumlah warga yang bersedia mendaftarkan NIK sebagai syarat pembelian LPG 3 kg menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif dalam pengabdian berhasil menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat. Selain itu, pendampingan langsung kepada agen dan pangkalan dalam memahami sistem pencatatan digital mendorong kesiapan mereka dalam mendukung sistem distribusi yang lebih transparan dan tertib administrasi. Namun demikian, tidak semua hasil pengabdian berjalan mulus. Beberapa warga, terutama lansia dan mereka yang tidak memiliki KTP, merasa kesulitan mengikuti proses digitalisasi.

Hal ini sejalan dengan temuan dari kegiatan pengabdian serupa yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada di Kabupaten Sleman, di mana sebagian warga menolak perubahan

sistem karena merasa terbebani oleh keharusan mendaftarkan data pribadi. Selain itu, tidak tepat sasaran dan juga kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait. Penyebab ini bervariasi, mulai dari pengurangan kuota subsidi, perubahan kebijakan distribusi, hingga disparitas harga dengan gas non-subsidi. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penyesuaian kuota, pengawasan distribusi yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Melalui penerapan teknologi pada aplikasi Merchant Apps (MAP) diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut.

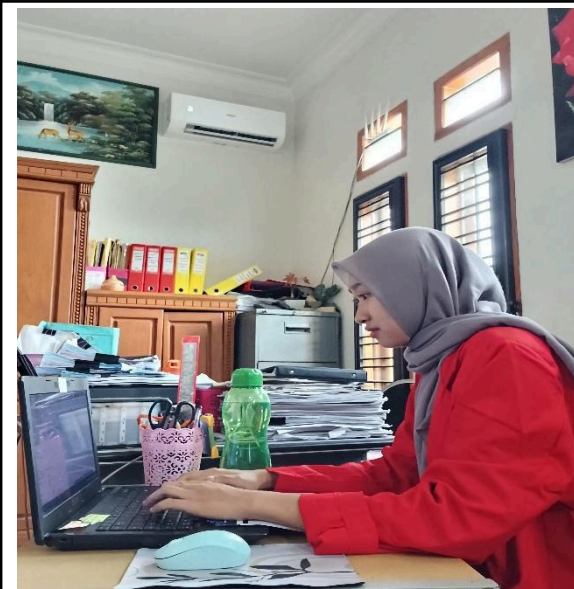
Menurut Carl Mitcham teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan manusia melalui penelitian, pengembangan, dan produksi untuk memecahkan masalah praktis. Penerapan teknologi melalui aplikasi Merchant Apps (MAP) digunakan untuk membantu dalam manajemen stok LPG 3 kg memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi distribusi, pengawasan stok, dan pengendalian penyalahgunaan. Berikut beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dengan adanya penggunaan aplikasi Merchant Apps (MAP):

1. Pengurangan kelangkaan lpg 3 kg, dengan sistem pemantauan stok berbasis digital maka kelangkaan dapat dicegah karena distribusi bisa dilakukan lebih responsive terhadap data real time.
2. Membantu dalam proses pengawasan konsumsi subsidi dimana integritas data dengan NIK atau KTP memungkinkan subsidi tepat sasaran, dan dapat mengurangi potensi penyelewengan.
3. Mempermudah pencatatan dan perencanaan pengiriman, mengurangi kekhawatiran kelangkaan dan meningkatkan keadilan distribusi.

Selain itu, terdapat beberapa dampak yang mungkin terjadi jika subsidi tidak tepat sasaran di masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Pemborosan anggaran negara, hal ini menyebabkan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkan menjadi tidak efektif.
2. LPG 3 kg mengalami kenaikan harga dimana permintaan melebihi pasokan karena konsumen tidak tepat sasaran menyerap kuota sehingga masyarakat kecil terpaksa membeli LPG 3 kg dengan harga lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi).
3. Semakin memburuknya kesenjangan ekonomi, karena subsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin malah dinikmati oleh masyarakat yang lebih mampu.
4. Dapat mengganggu operasional UMKM yang sangat bergantung pada LPG 3 kg, dan berpotensi mengarah pada kebangkrutan yang disebabkan dari adanya kelangkaan atau pembatasan distribusi.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan mekanisme penyaluran subsidi tepat LPG tidak hanya bergantung pada sistem digital yang disiapkan pemerintah, tetapi juga pada pendekatan edukatif yang melibatkan masyarakat secara langsung, serta keterlibatan aktif dari pemerintah desa dan pelaku distribusi di lapangan.



Gambar 1 Dokumentasi selama kegiatan magang



Gambar 2 Survei lapangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran subsidi tepat LPG 3 kg menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih relatif rendah, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan rendah dan yang belum familiar dengan sistem digital. Meskipun demikian, pendekatan sosialisasi yang komunikatif, partisipatif, dan berbasis lokal terbukti mampu meningkatkan kesadaran serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dan verifikasi pengguna LPG bersubsidi. Resistensi sebagian masyarakat terhadap pendataan NIK dan kekhawatiran terkait perlindungan data menunjukkan pentingnya transparansi dan jaminan keamanan informasi dalam implementasi kebijakan. Selain itu, kesiapan agen dan pangkalan dalam menjalankan sistem distribusi digital juga menjadi faktor kunci yang perlu diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan subsidi tepat LPG 3 kg memerlukan sinergi antara edukasi masyarakat, penguatan kapasitas pelaku distribusi, serta dukungan aktif dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Intervensi yang tepat dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan sistem penyaluran subsidi yang lebih adil, efisien, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, O, V.(2020). Subsidi Gas LPG Tabung 3 kg. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2020*.
- Yuliani,R, D. (2024). Evaluasi Program Subsidi Gas LPG 3 Kg Tepat Sasaran Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Universitas Tidar*.
- Sudarman Daman, Akdyaputra Rhezvur. (2025). Efektivitas Merchant Apps My Pertamina Dalam Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Agar Subsidi Tepat Sasaran di Jakarta Selatan (Studi Kasus Rantai Pasok). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.

- Azizah Rahmatul A. (2017). IMPLEMENTASI KEBJAKAN SUBSIDI LPG 3 KG DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN. Universitas Terbuka.
- Lestari Puji V, Azmi Nurul, Arizky Prabuwangi A. (2022). PERMASALAHAN DAN TANTANGAN TRANSFORMASI KEBIJAKAN SUBSIDI LPG 3 KLOGRAM. Pusat Kajian Akunabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.